



BAPPENDA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023



Jalan Tegar Beriman Cibinong 16914
Telp/Fax: (021) 87912462 / 87912442
Website: www.bappenda.bogorkab.go.id

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor merupakan perwujudan pertanggungjawaban

atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023.

Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan BAPPENDA Kabupaten Bogor yang mengemban amanah menjalankan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Cibinong, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,



ANDRI HADIAN, S.E, S.T, M.M.

Pembina

NIP. 19740602 200212 1 006

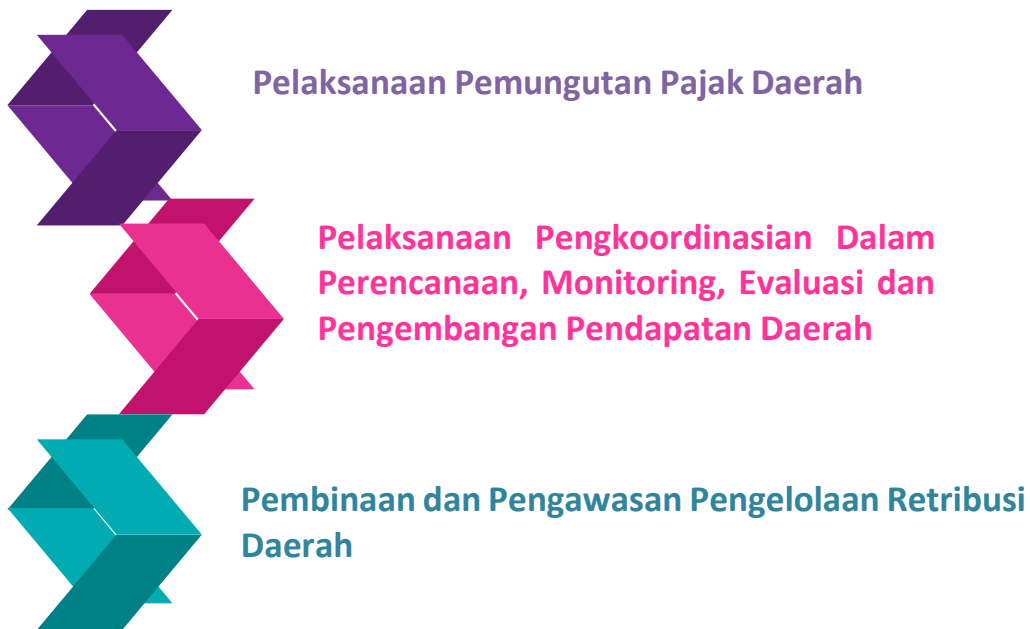
Ringkasan Eksekutif

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah, khususnya penunjang bidang pendapatan daerah. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Fungsi BAPPENDA

- 1 Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2 Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 4 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 5 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 6 Pelaksanaan Administrasi Badan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Berkaitan dengan hal tersebut, secara substansi sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang pendapatan daerah, terutama yang berkenaan dengan :



Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdapat 1 (satu) sasaran dan terdapat 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023 pada Program Utama.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah tercapai. Dari 2 (dua) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD juga komitmen Badan Pengelolaan Pendapatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance* serta memberikan pelayanan prima dengan slogan Bappenda Juara (*Jujur, Amanah dan Ramah*).



KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL..... v

BAB I PENDAHULUAN 6

 A. Latar Belakang..... 6

 B. Maksud dan Tujuan 8

 C. Tugas dan Fungsi 8

 D. Struktur Organisasi 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA12

 A. Rencana Strategis Tahun 2018-202312

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

 A. Capaian Kinerja Organisasi 17

 B. Realisasi Anggaran 24

BAB IV PENUTUP 30

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPENDA Tahun 2023
2. Laporan Evaluasi Kinerja BAPPENDA Bulan Desember Tahun 2023



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappenda Tahun 2023	9
Gambar 1.2 Jumlah UPT Pajak Daerah Daerah Bappenda Kab. Bogor	10
Gambar 1.3 Kondisi SDM Bappenda Tahun 2023	11
Gambar 3.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Bappenda	18
Gambar 3.2 Grafik Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2023	19
Gambar 3.3 Grafik Rasio PAD Tahun 2023 dengan PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022-2023	21
Gambar 3.4 Grafik Capaian Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2022-2023	22
Gambar 3.5 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program Tahun 2023	24
Gambar 3.6 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Bappenda Tahun 2023	29
Tabel 2.1 Renstra Tahun 2021-2023	14
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda	14
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Bappenda Tahun 2023	15
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappenda	17
Tabel 3.2 Sasaran ke -1 Bappenda	20
Tabel 3.3 Sasaran Ke-2 Bappenda	21
Tabel 3.4 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	22
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Bappenda Tahun Anggaran 2023	29



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2023 kepada Bupati Bogor, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappenda Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappenda Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2023. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa *output* dan atau *outcome* dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappenda Kabupaten Bogor Tahun 2023.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan menyelaraskan terhadap pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023, Pada Tahun 2023 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki tujuan yaitu berkenaan dengan **Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel** dengan sasarannya antara lain:

- 01** **Sasaran 1**
Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang Efektif
- 02** **Sasaran 2**
Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Baik, Bersih dan Efektif

Dengan strategi **Optimalisasi Perencanaan Target dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah**. Sasaran 1 diampu oleh 4 (empat) bidang yaitu: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; Bidang Pendataan dan Penilaian; Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah. Sedangkan sasaran 2 diampu oleh Sekretariat badan dalam menunjang keberlangsungan berjalannya organisasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu :

1. Perencanaan Pendapatan daerah belum optimal berdasarkan potensi pendapatan daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah;
3. Belum optimalnya penerimaan dana transfer pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Daerah Lainnya;
4. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah;
5. Belum optimalnya integrasi data pengelolaan pendapatan daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2023. Adapun tujuannya adalah: 1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders; 2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bappenda merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, khususnya penunjang bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1.** Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2.** Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapata Daerah
- 3.** Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 4.** Pembinaan Teknis Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 5.** Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 6.** Pelaksanaan Administrasi Badan
- 7.** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Dimana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappenda Tahun 2023

Untuk melaksanakan tugas teknis penunjang pelayanan pada Pajak Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, berjumlah 10 UPT yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor sebagai berikut:

UPT PAJAK DAERAH BAPPENDA KABUPATEN BOGOR

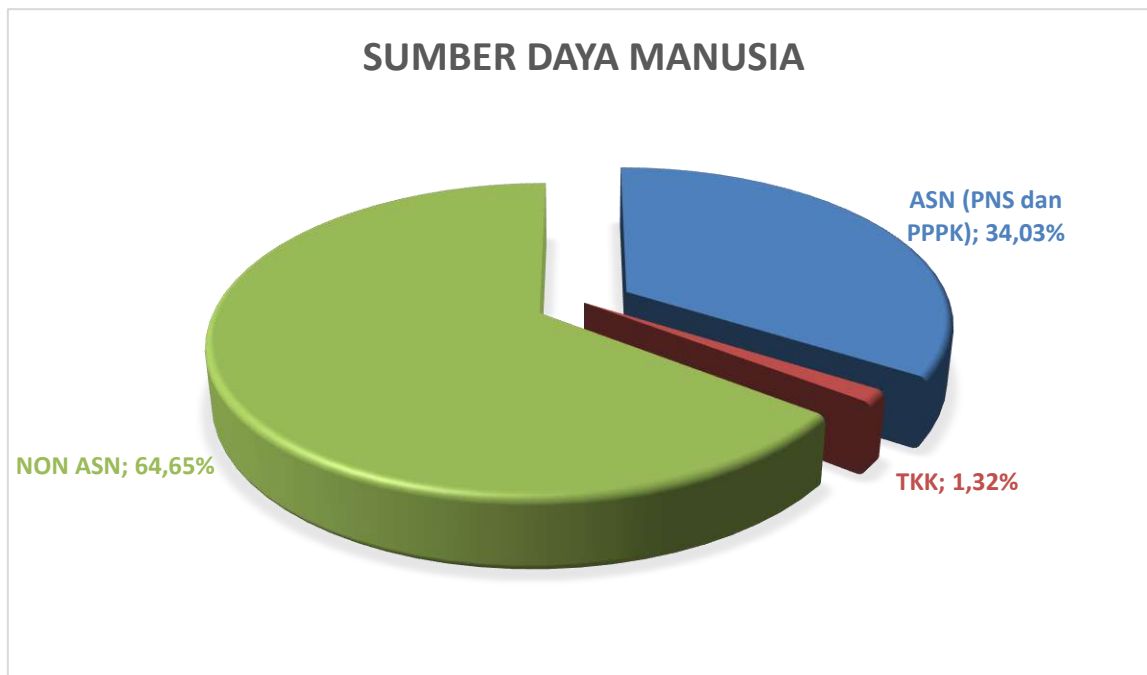
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 101 TAHUN 2020



Gambar 1.2 Jumlah Kecamatan UPT Pajak Daerah Kelas A Bappenda Kabupaten Bogor

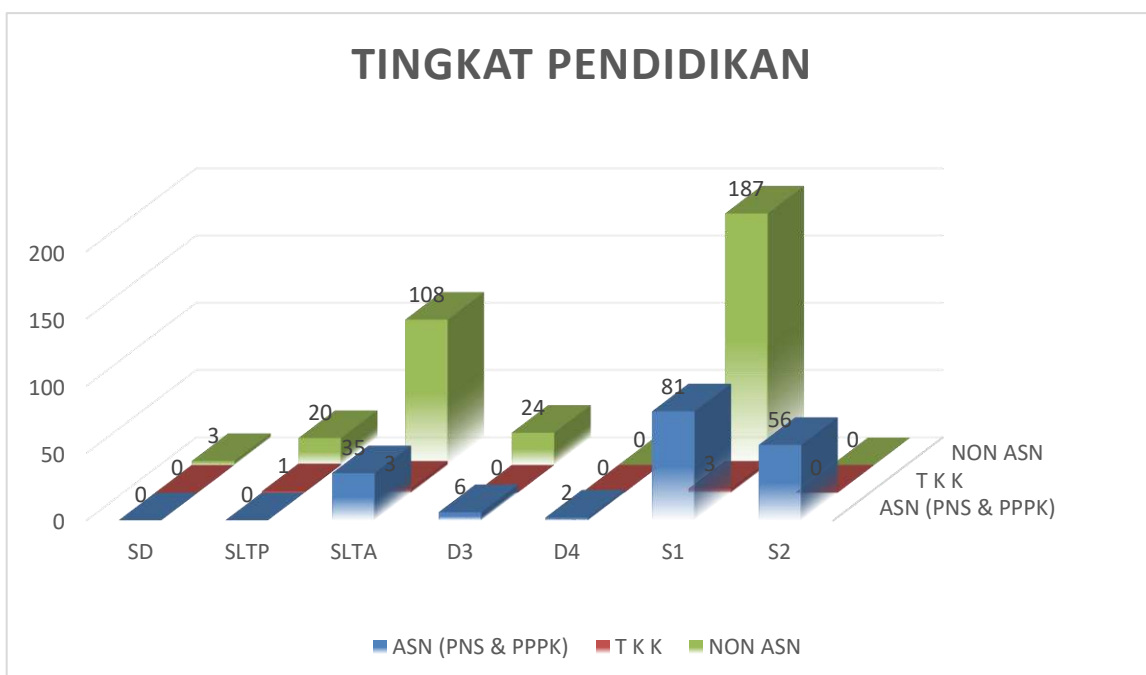
Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah pada UPT. Kepala UPT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam hal pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan UPT, serta Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian, seperti Penilai Pajak, Juru Sita, Arsiparis, dan Pemeriksa Pajak yang sampai saat ini masih belum terpenuhi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2023 didukung oleh sumber daya manusia secara keseluruhan sebanyak 529 orang/pegawai. Terdiri dari 180 orang ASN (179 PNS dan 1 PPPK), 7 orang TKK dan 342 orang tenaga Non ASN (Teknis, Keamanan dan OB) dengan perbandingan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Kondisi SDM Bappenda Tahun 2023 Berdasarkan Jumlah Pegawai

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar pegawai di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor berpendidikan (S-2) sebanyak 56 orang, (S-1) sebanyak 271 orang, (D4) sebanyak 2 orang, (D3) sebanyak 30 orang, SLTA sebanyak 146 orang, SLTP sebanyak 21 orang dan SD sebanyak 3 orang. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi Kabupaten Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, adalah:

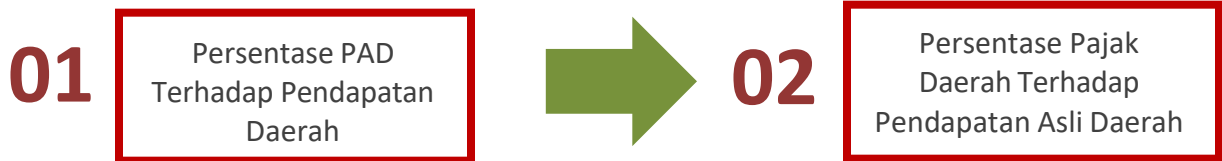
“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kesalehan sosial.

Salah satu misi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BAPPENDA adalah misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu **"Tata Kelola Pendapatan Daerah Efektif dan Akuntabel"** dengan indikator kinerja sebagai berikut:



Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka telah ditetapkan 2 (dua) **Indikator sasaran** strategis yaitu :

1. Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Yang Efektif.

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui **1 (satu) Program Utama Pengelolaan Pendapatan Daerah** yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Baik, Bersih dan Efektif.

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui **1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:



Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri dari 1 Program 7 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Terdiri dari 1 Program 1 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018–2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Tahun 2019-2020								
1	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	34,19	36,22			
		1. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas	1. Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	%	100	100			
		2. Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif	2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	68,33	67,50			

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
1		Rasio PAD			34,57	44,25	47,21
	Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif	1.Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah			36,50	40,75	47,37
		2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah			66,26	63,38	69,59

Tabel 2.1 Renstra Tahun 2021-2023

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 33), merupakan perencanaan tahunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. RKPD Kabupaten Bogor berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang telah disusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun berkenaan. Pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah menjadi parameter atau tolak ukur terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif	1.Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	47,37%	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
	2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	69,59%	1. Bidang Pendataan dan Penilaian 2. Bidang Pelayanan dan Penetapan 3. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan
Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang baik, bersih dan efektif	Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	100%	Sekretariat Badan

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda

Berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) BAPPENDA disusunlah Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan target tahun kelima dari Renstra BAPPENDA Kabupaten Bogor tahun 2018-2023.

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian kinerja inilah yang menjadi dasar target kinerja seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut, BAPPENDA mendapat dukungan anggaran dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 191.363.717.464,00 yang digunakan untuk melaksanakan 8 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang terangkum dalam 1 program penunjang dan 1 program utama dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2023 (SETELAH PERUBAHAN)
I	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.246.338.791,00
1 PROGRAM 7 KEGIATAN 38 SUB KEGIATAN		
A.	5.02.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.351.426.713,00
B.	5.02.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	146.300.152.671,00
C.	5.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.326.481.206,00
D.	5.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.721.463.525,00
E.	5.02.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.067.000.000,00
F.	5.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.206.288.872,00
G.	5.02.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.273.525.804,00
II	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	28.117.378.673,00
1 PROGRAM 1 KEGIATAN 15 SUB KEGIATAN		
A.	5.02.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH)	4.550.808.869,00
B.	5.02.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN)	3.098.167.868,00
C.	5.02.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN)	5.464.167.677,00
D.	5.02.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH)	15.004.234.259,00

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Bappenda Tahun Anggaran 2023

Rincian anggaran per kegiatan Badan Pengeloan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 tersaji dalam Lampiran-2.

Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 1 sasaran strategis BAPPENDA Tahun 2023 dengan alokasi sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN
Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Yang Efektif	Rp. 191.363.717.464,00

PROGRAM	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 163.246.338.791,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 28.117.378.673,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang diperjanjikan Tahun 2023. Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :

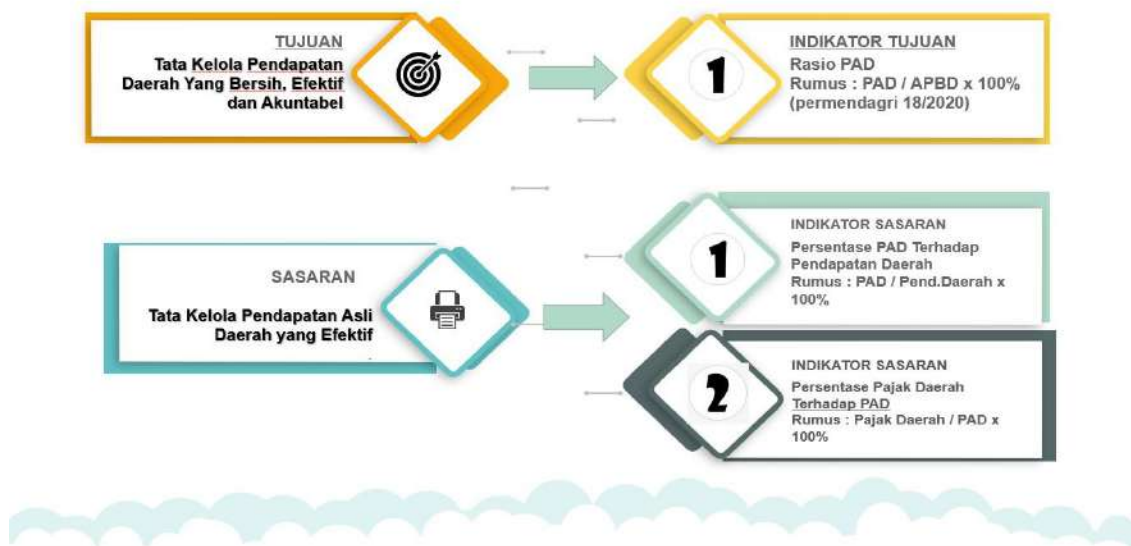
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		Rasio PAD	47,21%	41,72%	88,37%
	Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif	1.Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	47,37%	41,72%	88,07%
		2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	69,59%	68,57%	98,53%
	Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Baik, Bersih dan Efektif	Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	100%	100%	100%

(Laporan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2022)

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappenda Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dalam proses pengukuran kinerja tetap memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja diukur dengan memperhatikan capaian sebelumnya.

INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN BAPPENDA



Gambar 3.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Bappenda

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tata kelola pendapatan asli daerah yang efektif merupakan sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dihitung berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah “Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Bersih, Efektif dan Akuntabel” yang dihitung berdasarkan Rasio PAD yang dihitung dengan rumus:

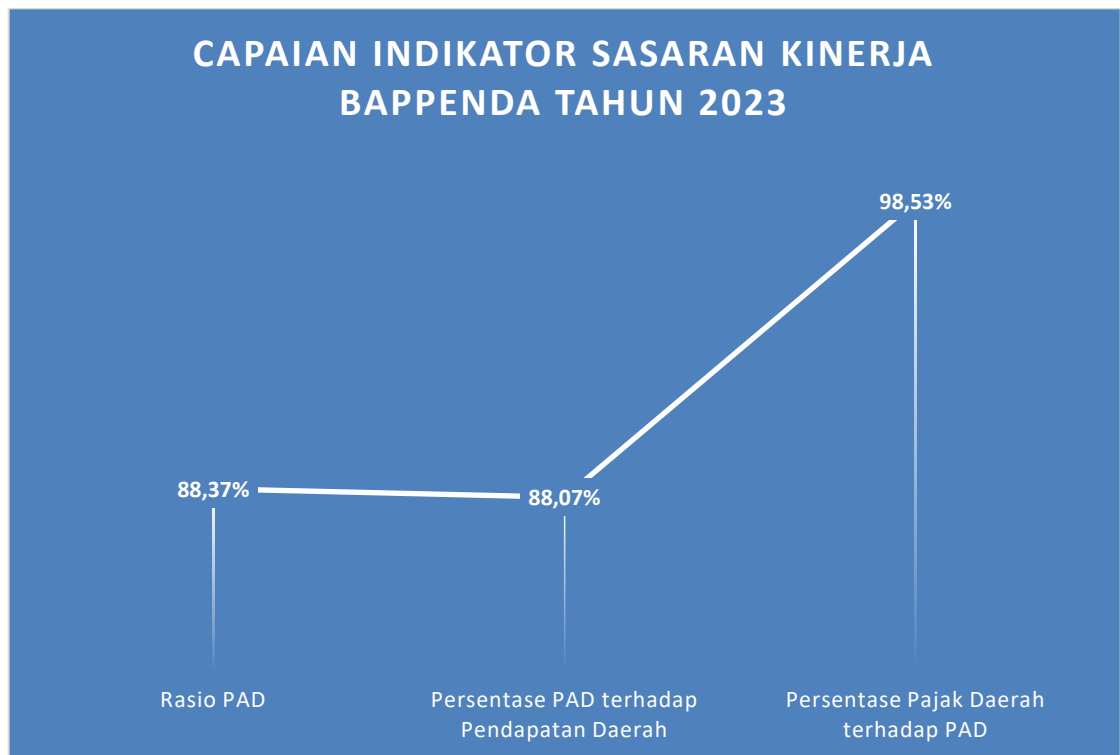
$$\text{Pendapatan Asli Daerah/APBD} \times 100\%$$
 dimana realisasi APBD Tahun 2023 diperoleh sebesar Rp. 9.808.961.473.317,00 sedangkan realisasi pendapatan asli Daerah Tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023 diperoleh sebesar Rp. 4.092.304.264.496,00 sehingga persentase realisasi Rasio PAD tahun 2023 sebesar 41,72% dengan capaian kinerja sebesar 88,37%.
2. Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah “Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Yang efektif” yang terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu:
 - 1) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

$$\text{Dirumuskan : PAD/Pendapatan Daerah} \times 100\%$$
 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 diperoleh sebesar Rp. 4.092.304.264.496,00 sedangkan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp. 9.808.961.473.317,00 sehingga persentase PAD terhadap pendapatan daerah direalisasikan sebesar 41,72% dengan capaian sebesar 88,07% sehingga tingkat capaian indikator kinerja berpredikat “sangat tinggi” yaitu rata-rata capaiannya 91,66% (>90,9 <140).

2) Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dirumuskan : $\text{Pajak Daerah} / \text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%$

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 diperoleh sebesar Rp.2.805.983.839.344,00 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 4.092.304.264.496,00 sehingga persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah direalisasikan sebesar 68,57% dengan capaian sebesar 98,53%, dapat dilihat bahwa terjadi ketimpangan antara target renstra dengan persentase realisasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.



Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2023

Adapun uraian dan analisis mengenai kinerja capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:



INDIKATOR	2022			2023			Rata-Rata Capaian 2022 dan 2023
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Rasio PAD	44,25%	41,33%	93,41%	47,21%	41,72%	88,37%	90,89%
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	40,75%	41,33%	101,42%	47,37%	41,72%	88,07%	94,75%

(Laporan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2023)

Tabel 3.2 Sasaran ke -1 Bappenda

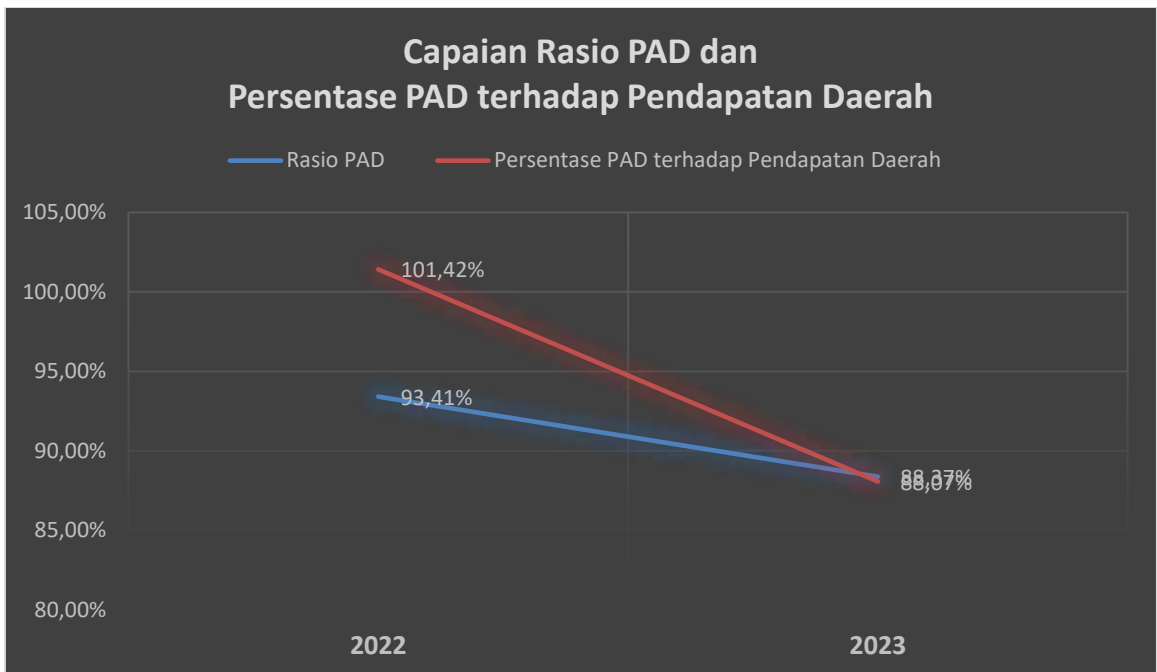
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan misi ke-3 dari RPJMD Kabupaten Bogor terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintah daerah yang baik, bersih dan efektif dapat diwujudkan dan diperoleh dari penjabaran indikator sasaran sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- 01

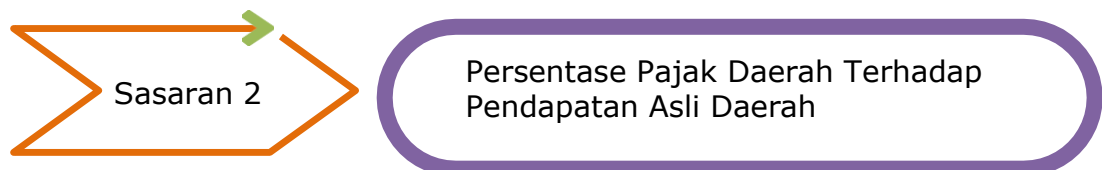
Rasio PAD pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 47,21% terealisasi sebesar 41,72% sehingga capaian kinerjanya diperoleh sebesar 88,37%, sasaran indikator tujuan ini ditargetkan pada rencana strategis perubahan Tahun 2021-2023
- 02

Realisasi indikator sasaran persentase PAD terhadap pendapatan daerah pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 47,37% dengan realisasi sebesar 41,72% dengan capaian 88,07% dimana capaian kinerja pendapatan daerah tercapai

Capaian rata-rata sasaran indikator kinerja pertama untuk persentase PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2022 dan 2023 diperoleh sebesar 94,75%, dimana capaian kinerja tahun 2022 sebesar 101,42% sedangkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 88,07% turun sebesar 6,68% dari nilai capaian rata-rata. Begitupun dengan realisasi yang dicapai lebih tinggi 0,39% dari realisasi di Tahun 2022 sebesar 41,33% meningkat menjadi 41,72% di Tahun 2023. Indikator sasaran presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebagai pertimbangan dalam kemandirian keuangan daerah.



Gambar 3.3 Grafik Capaian Rasio PAD dan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022-2023

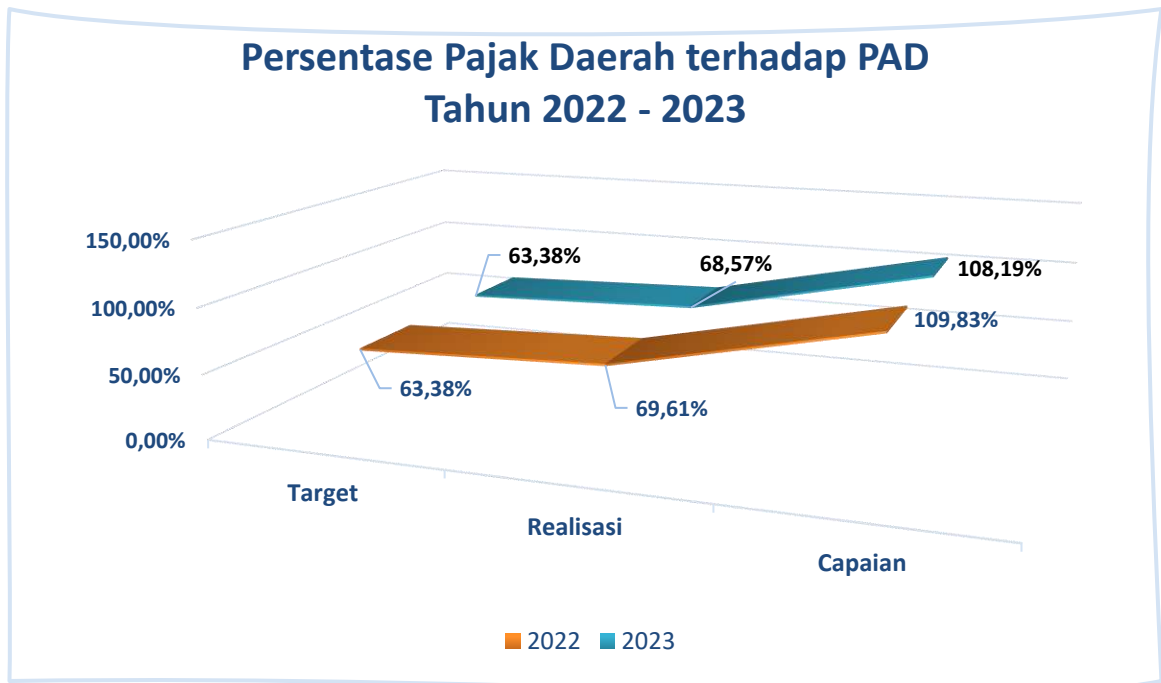


INDIKATOR	2022			2023			Rata-Rata Capaian 2022 dan 2023
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	63,38%	69,61%	109,83%	69,59%	68,57%	98,53%	104,18%

(Laporan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2023)

Tabel 3.3 Sasaran Ke-2 Bappenda

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa target pada tahun 2022 sebesar 63,38%, terealisasi sebesar 69,61% dengan capaian kinerjanya sebesar 109,83%, sedangkan target tahun 2023 sebesar 69,59% dengan realisasi sebesar 68,57% dengan capaian kinerja sebesar 98,53%. Rata-rata capaian Presentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebesar 104,18%. Namun jika dibandingkan capaian presentase tahun 2023 terhadap tahun 2022 terdapat penurunan sebesar 11,3%, penurunan capaian ini dikarenakan kondisi pengaruh dari dampak pandemi covid-19 yang mulai berangsur membaik, sehingga perekonomian masyarakat masih menyesuaikan kondisi saat ini. Namun dapat dilihat darisisi realisasi penerimaan bahwa untuk pajak daerah tahun 2023 mencapai 107,43% dengan over target sebesar Rp. 194.081.946.844,00 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah mencapai 103,50% dengan over target sebesar Rp. 138.200.049.636,00 dari target sebesar Rp. 3.954.104.214.860,00.



Gambar 3.4 Grafik Capaian Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2022-2023

Analisis Efisiensi yang dilakukan pada 2 (dua) program kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Tahun 2023 yaitu terdiri dari:

- 1) Program Penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 7 kegiatan dan 38 sub kegiatan terealisasi sebesar Rp. 160.978.401.309,00 dari target sebesar Rp.163.246.338.791,00 dengan capaian kinerja sebesar 98,81%
- 2) Program Utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan dan 15 sub kegiatan terealisasi sebesar Rp.27.355.616.183,00 dari target sebesar Rp. 28.117.378.673,00 dengan nilai capaian kinerja sebesar 103,50%

Rincian Capaian Kinerja dan Anggaran di Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Program	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	98,81%	Rp. 160.978.401.309,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	103,50%	Rp. 27.355.616.183,00

Tabel 3.4 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai dengan efisiensi anggaran belanja sebesar Rp. 3.029.699.972,00 atau 1,58% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 2.876.907.733,00 atau 1,51% dan belanja modal sebesar Rp.152.792.239,00 atau 12,02%

Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kinerja melalui program utama pengelolaan pendapatan daerah dengan kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah yang diimplementasikan melalui:

- 1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 2) Sub Kegiatan Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah
- 3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- 5) Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
- 6) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 8) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 9) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 10) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 11) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 12) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
- 13) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 14) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 15) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Permasalahan utama yang berkaitan dengan pendapatan daerah di tahun 2023 lebih disebabkan karena pemulihan ekonomi masyarakat dampak pandemi *COVID-19*. Hal tersebut sebagai akibat dari penurunan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak atas usaha yang dilakukannya yang berdampak langsung penurunan penerimaan omzet wajib pajak yang berbanding lurus dengan penerimaan pajak daerah, oleh sebab itu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah membuat kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 yang dapat meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah yang terdiri dari:

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

OPTIMALISASI PENGGALIAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH;

PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;

OPTIMALISASI PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM UPAYA PERCEPATAN DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH;

RELAKSASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI MASYARAKAT YANG MASIH DALAM PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL;

OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH;

PENGUATAN REGULASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang mendukung tercapainya sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 188.334.017.492,00 atau 98,42% dari target sebesar Rp.191.363.717.464,00 yang terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan, yang dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 3.5 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program Tahun 2023

Pelaksanaan program kegiatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, dengan total anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 163.246.338.791,00 terealisasi sebesar Rp.160.978.401.309,00 atau 98,61%, dengan target kinerja 100% terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,81%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :**

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.351.426.713,00 terealisasi sebesar Rp. 1.256.831.920,00 atau 93,00%, dengan output dari target kinerja sebanyak 18 dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah dan terealisasi sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%**

- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 146.300.152.671,00, terealisasi sebesar Rp.145.367.309.674,00 atau 99,36%, dengan output dari target kinerja sebanyak 1.164 dokumen laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan terealisasi sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%
- C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 2.326.481.206,00, terealisasi sebesar Rp.2.148.919.429,00 atau 92,37%, dengan output dari target kinerja sebanyak 100% tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan tingkat capaian kinerja laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah tersusun dengan baik sebesar 100%
- D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 3.721.463.525,00, terealisasi sebesar Rp.3.286.511.116,00 atau 88,31%, dengan output dari target kinerja sebanyak 100% tersedianya layanan administrasi umum dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja pelayanan umum terlaksana dengan baik sebesar 100%
- E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.067.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 1.067.000.000,00 atau 100,00%, dengan output dari target kinerja sebesar 100% tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik sebesar 100%
- F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 5.206.288.872,00, terealisasi sebesar Rp. 4.795.584.896,00 atau 92,11%, dengan output dari target kinerja sebesar 100% tersedianya layanan jasa penunjang urusan perangkat daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah terlaksana dengan baik sebesar 100%
- G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana anggaran kegiatan sebesar Rp. 3.273.525.804,00, terealisasi sebesar Rp. 3.056.244.274,00 atau 93,36%, dengan output dari target kinerja sebesar 100% tersedianya layanan pemeliharaan barang milik daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja terpeliharanya barang milik daerah yang baik sebesar 100%.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan, dengan total anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.28.117.378.673,00, terealisasi sebesar Rp. 27.355.616.183,00 atau 97,29%, dengan target kinerja sebesar 100% persentase realisasi pencapaian target PAD dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,50%, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 28.117.378.673,00, terealisasi sebesar Rp.27.355.616.183,00 atau 97,29%, dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen pengelolaan pendapatan daerah terdiri dari 15 Sub Kegiatan, yang meliputi:

- 1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 408.319.766,00, terealisasi sebesar Rp. 405.974.248,00 atau 99,43%, dengan target kinerja sebanyak 15 dokumen potensi pajak daerah dan target pendapatan serta dokumen rencana pengelolaan pajak daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan rencana anggaran belanja sebesar Rp. 708.538.260,00, terealisasi sebesar Rp. 681.629.690,00 atau 96,20%, dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen rancangan produk hukum pajak daerah, dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 4 dokumen atau sebesar 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.1.592.601.772,00, terealisasi sebesar Rp. 1.523.300.393,00 atau 95,65% dengan target kinerja sebanyak 3.322 media sosialisasi cetak, 3 media sosialisasi elektronik dan 618 orang sosialisasi tatap muka dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 3.322 media sosialisasi cetak, 3 media elektronik dan 618 orang sosialisasi tatap muka atau sebesar 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.1.723.664.261,00, terealisasi sebesar Rp. 1.702.123.956,00 atau 98,75%, dengan target kinerja sebanyak 1 jaringan tersedianya infrastruktur sistem informasi pengelolaan pajak daerah dan 3 aplikasi tersedianya pengelolaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- 5) Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 117.684.810,00, terealisasi sebesar Rp. 111.650.600,00 atau 94,87%, dengan target kinerja sebanyak 2 laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan terealisasi tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 6) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 1.897.156.892,00, terealisasi sebesar Rp. 1.854.930.281,00 atau 97,77%, dengan target kinerja sebanyak 5 laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah lingkup badan, serta 2 laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah lingkup UPT pajak daerah kelas A dan terealisasi sebesar 97,77% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 7) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.448.173.117,00, terealisasi sebesar Rp. 419.631.984,00 atau 93,63% dengan target kinerja sebanyak 5 laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 5 laporan data pajak daerah yang diolah atau sebesar 100%.
- 8) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.752.837.859,00, terealisasi sebesar Rp.701.890.518,00 atau 93,23% dengan target kinerja sebanyak 70 objek pajak yang disesuaikan NJOP nya dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 83 objek pajak yang disesuaikan NJOP nya atau sebesar 118,57%.
- 9) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.1.267.302.859,00, terealisasi sebesar Rp. 1.241.614.021,00 atau 97,97%, dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen ketetapan pajak daerah dan terealisasi dengan target capaian kinerja sebanyak 12 dokumen atau sebesar 100%.
- 10) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 3.237.580.521,00, terealisasi sebesar Rp. 3.094.450.167,00 atau 95,58%, dengan target kinerja sebanyak 175.000 wajib pajak yang melakukan permohonan pelayanan serta konsultasi dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 231.562 berkas permohonan pelayanan dan

konsultasi atau sebesar 102,94%.

- 11) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.959.284.297,00, terealisasi sebesar Rp. 885.839.730,00 atau 92,34% dengan target kinerja sebanyak 60.000 berkas permohonan BPHTB yang diteliti dan diverifikasi, dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 60.896 berkas permohonan atau sebesar 101,00%.
- 12) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.12.271.154.587,00, terealisasi sebesar Rp. 12.153.558.033,00 atau 99,04%, dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 12 dokumen atau sebesar 100%.
- 13) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 933.974.035,00, terealisasi sebesar Rp. 902.588.112,00 atau 96,64%, dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 12 dokumen atau sebesar 100%.
- 14) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp.1.638.416.676,00, terealisasi sebesar Rp. 1.521.143.640,00 atau 92,84%, dengan target kegiatan sebanyak 2 dokumen laporan dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 2 dokumen laporan atau sebesar 100%.
- 15) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 160.688.961,00, terealisasi sebesar Rp. 155.290.810,00 atau 96,64% dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah serta 3 jenis retribusi per triwulan dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh rata-rata tingkat capaian program (*outcome*) sebesar 100,86% dengan predikat SANGAT TINGGI

Realisasi Belanja Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 188.334.017.492,00 atau 98,42% dari target belanja daerah sebesar Rp. 191.363.717.464,00 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 187.215.272.152,00 atau 98,49% dari target sebesar Rp. 190.092.179.885,00 yang terkontribusi dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 95.201.623.101,00 atau 99,09% dari target sebesar Rp.96.080.097.023,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.92.013.649.051,00 atau 97,87% dari target sebesar Rp.94.012.082.862,00.
- 2) Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 1.118.745.340,00 atau 87,98% dari target sebesar Rp. 1.271.537.579,00.

Realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2023 (SETELAH PERUBAHAN)	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2023	%
	BELANJA DAERAH	191.363.717.464,00	188.334.017.492,00	98,42
I	BELANJA OPERASI	190.092.179.885,00	187.215.272.152,00	98,49
A	BELANJA PEGAWAI	96.080.097.023,00	95.201.623.101,00	99,09
B	BELANJA BARANG DAN JASA	94.012.082.862,00	92.013.649.051,00	97,87
II	BELANJA MODAL	1.271.537.579,00	1.118.745.340,00	87,98

Tabel. 3.5 Realisasi Belanja Daerah Bappenda Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.6 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Daerah Bappenda Tahun 2023



BAB IV PENUTUP

Laporan Instansi Kinerja Bappenda Kabupaten Bogor Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Bappenda Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bappenda Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Bappenda Kabupaten Bogor dan hasil yang telah dicapai.

Berbagai hambatan internal dan eksternal yang terdapat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappenda Kabupaten Bogor selama tahun 2023, berdampak terhadap kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan dan penyerapan anggaran kegiatan belum terserap secara optimal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor akan melakukan langkah- langkah strategis untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang masih terjadi di Tahun 2023, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh *stake holder* dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan kemudahan kepada wajib pajak dengan peningkatan pelayanan daerah secara online (Antrian Online, E SPPT Online, BPHTB Online, E SPTPD Online);
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparaturnya pemungut pajak ;
4. Mengintegrasikan sistem penerimaan pendapatan daerah dengan manajemen pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.;
5. Perluasan Kemudahan Pembayaran Pajak Daerah (UPT Pajak Daerah Kelas A, Bank BJB, BRI, Indomaret, Alfamart, PT. Pos, Tokopedia, Bukalapak, Link Aja, Traveloka, Blibli, Masago, Ovo, serta QRIS melalui BJB Kantor kas Bappenda dan UPT Pajak Daerah Kelas A).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2023 secara tepat waktu.